



BASELANG Jurnal Ilmu Pertanian, Peternakan,
Perikanan dan Lingkungan
e-journal.faperta.universitasmuarabungo.ac.id

**Pemberdayaan Sektor Agribisnis Sebagai Upaya Peningkatan Ketahanan Pangan
(Artikel Review)**

*Empowerment Of The Agribusiness Sector As A Effort To Increase Food Security
(Artikel Review)*

Fikriman, Nini Mawaddah Haryadi, Pitriani

Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Muara Bungo

Article Info

Keywords : *economy, empowerment, food security, sector.*

Email:

fikrimanlukman@gmail.com

ninimawaddah99phone@gmail.com

pitrianianto@yahoo.com

Program Studi Agribisnis,
Fakultas Pertanian, Universitas
Muara Bungo, Jl. Pendidikan,
Rt.10 Rw.02 No.10 Kelurahan
Sungai Binjai. Kecamatan
Bathin III. Kabupaten Bungo,
Jambi 37288, Indonesia

ABSTRAK

Sektor agribisnis merupakan mega sektor dalam perekonomian nasional, melibatkan seluruh wilayah nasional, melibatkan dan menghidupi sekitar 80 persen penduduk Indonesia, menyerap sebagian besar angkatan kerja nasional dengan berbagai kualitas dan berbagai latar belakang sosial budaya. Sebagai upaya dalam peningkatan ketahanan pangan maka diperlukannya pemberdayaan pada sektor agribisnis. Krisis pangan tidak dapat dipecahkan hanya pada subsektor, tetapi harus menyeluruh mulai dari agribisnis hulu, usahatani, dan hilir pangan termasuk penyediaan jasa penunjang. Sebagai bagian dari perekonomian nasional, kinerja sektor agribisnis dipengaruhi oleh strategi dan kebijakan ekonomi yang ditempuh pemerintah. Tujuan penulisan ini adalah untuk membahas keterkaitan pemberdayaan antara sektor agribisnis khususnya sebagai upaya peningkatahn ketahanan pangan. Sejak krisis ekonomi melanda hanya sektor agribisnis domestik yang mampu bertahan, maka daripada itu untuk melakukan penyesuaian diri pada lingkungan baru, yakni dengan memberdayakan sektor ekonomi agribisnis sebagai strategi industrialisasi nasional yang mampu membangun fundamen neraca pembayaran Indonesia yang kuat dalam jangka panjang serta mampu bertahan khususnya pada masa krisis pangan yang mempunyai potensi untuk pemulihan ekonomi nasional.

Kata kunci : ekonomi, pemberdayaan, ketahanan pangan, sektor.

ABSTRACT

The agribusiness sector is a mega sector in

the national economy, involving all national regions, involving and supporting about 80 percent of the Indonesian population, absorbing most of the national workforce with various qualities and various socio-cultural backgrounds. As an effort to increase food security, it is necessary to empower the agribusiness sector. The food crisis cannot be solved only in the sub-sector, but must be comprehensive starting from upstream agribusiness, farming, and downstream food, including the provision of supporting services. As part of the national economy, the performance of the agribusiness sector is influenced by the economic strategies and policies adopted by the government. The purpose of this paper is to discuss the relationship between empowerment of the agribusiness sector, especially as an effort to increase food security. Since the economic crisis hit, only the domestic agribusiness sector has been able to survive, therefore to make adjustments to the new environment, namely by empowering the agribusiness economic sector as a national industrialization strategy that is able to build a strong foundation of Indonesia's balance of payments in the long term and able to survive, especially in the long term. food crisis period that has the potential for national economic recovery.

Keywords : economy, empowerment, food security, sector.

Pendahuluan

Indonesia, sebagai salah satu negara agraris terbesar di dunia semestinya dapat memenuhi sumber kebutuhan pangannya sendiri. Dengan memanfaatkan semua potensi sumberdaya manusia, alam, kapital dan modal sosialnya serta kemampuan manajemen pemerintahan seharusnya indonesia mampu menjadi salah satu lumbung pangan dunia. Pada masa lalu kebijakan pangan nasional dirumuskan dalam GBHN yang mengarahkan agar ketahanan pangan indonesia dicapai dengan memanfaatkan sumberdaya alam, kelembagaan, dan budaya lokal serta memperhatikan kesejahteraan produsennya, khususnya para petani. Keberhasilan BIMAS Padi, BIMAS Ayam, pengembangan peningkatan produksi susu

sapi, ikan, udang dan peningkatan produksi minyak sawit merupakan beberapa contoh prestasi pembangunan pertanian. (Pambudi, 2006)

Sektor pertanian memiliki multifungsi yang mencakup aspek produksi atau ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan petani atau pengentasan kemiskinan, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Bagi desa nilai fungsi pertanian tersebut perlu dipertimbangkan dalam penetapan kebijakan sektor pertanian. Oleh sebab itu, pembangunan pertanian merupakan salah satu tulang punggung pembangunan nasional dan implementasinya harus sinergis dengan pembangunan sektor lainnya. Pelaku pembangunan pertanian meliputi

departemen teknis terkait, pemerintah daerah, petani, pihak swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya. Tujuan pembangunan pertanian adalah membangun sumberdaya manusia aparatur profesional, petani mandiri, dan kelembagaan pertanian yang kokoh, meningkatkan pemanfaatan sumberdaya pertanian secara berkelanjutan, memantapkan ketahanan dan keamanan pangan, meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk pertanian, menumbuh kembangkan usaha pertanian yang dapat memacu aktivitas ekonomi pedesaan, dan membangun sistem ketatalaksanaan pembangunan pertanian yang berpihak kepada petani. (Mustakim dan Fikriman, 2018)

Dalam hal pemenuhan kebutuhan pangan, negara-negara industri nonpertanian melakukan fasilitasi dengan cara meningkatkan daya beli rakyatnya dan meningkatkan kemampuan ekonomi nasionalnya supaya rakyat memiliki akses pangan dan pemerintah harus mampu mengatur ketersediaannya. Bagi negara pertanian dimana sebagian besar rakyatnya adalah juga berprofesi sebagai petani maka pemenuhan kebutuhan pangan dilakukan dengan memacu serta mengandalkan kemampuan produksi domestik. Strategi dan kebijakan ini dilakukan oleh semua negara kuat dan besar di dunia. Bahkan negara seperti Amerika Serikat melakukan kebijakan sistem menyeluruh dari pelayanan fasilitas pembangunan pertanian sebagai pusat ekonomi sebelum menjadi negara kuat. Pemerintah Amerika pada waktu itu, memainkan peranan besar dalam mendorong pembangunan termasuk dalam menunjang pembangunan pertanian. (Sliglitz, 2006)

Dengan perubahan struktur perekonomian nasional yang demikian, pada tahap selanjutnya prioritas pembangunan ekonomi nasional mengalami perubahan. Pembangunan industri yang didukung oleh pertanian

yang tangguh menjadi titik berat pembangunan ekonomi nasional. Disini muncul pertanyaan besar, bagaimana wujud pembangunan industri yang didukung pertanian tangguh. Disini dapat diartikan bahwa industri yang perlu dikembangkan adalah industri-industri yang mengolah hasil pertanian primer menjadi produk olahan, yakni agroindustri. Namun sekali lagi adalah bahwa agroindustri tidak mungkin berkembang dan bermanfaat bagi rakyat Indonesia, bila tidak didukung oleh pertanian primer sebagai penghasil bahan baku. Kemudian, pertanian primer tidak akan mampu berkembang bila tidak didukung oleh pengembangan industri-industri yang menghasilkan sarana produksi (industri hulu pertanian). Dan agroindustri, pertanian primer dan industri hulu pertanian tidak dapat berkembang dengan baik bila tidak didukung oleh sektor atau lembaga yang menyediakan jasa yang dibutuhkan. (Hermawan, 2006)

Pemenuhan kebutuhan pangan ini menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka mempertahankan kedaulatan negara, melalui tidak tergantung pada impor pangan dari negara maju. Ketergantungan suatu negara akan impor pangan (apalagi dari negara maju), akan mengakibatkan pengambilan keputusan atas segala aspek kehidupan menjadi tidak bebas atau tidak merdeka, dan karenanya negara menjadi tidak berdaulat secara penuh. (Yunastiti, 2008)

Dengan demikian pemerintah harus melaksanakan kebijakan pangan, yaitu menjamin ketahanan pangan yang meliputi pasokan, diversifikasi, keamanan, kelembagaan, dan organisasi pangan. Kebijakan ini diperlukan untuk meningkatkan kemandirian pangan. Pembangunan yang mengabaikan keswadayaan dalam kebutuhan dasar penduduknya, akan menjadi sangat tergantung pada negara lain, dan itu berarti menjadi negara yang tidak berdaulat. (Bustanul, 2004).

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk membahas keterkaitan pemberdayaan antara sektor agribisnis khususnya sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan.

Metodologi Penelitian

Penelitian-penelitian sebelumnya memperoleh sumber data dengan menerapkan beberapa metode analisis (multi-methods analysis) yaitu dengan mengaplikasikan beberapa metode yaitu metode Location Quotation (LQ), analisis SWOT, analisis Trend, dan analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada sub-sektor pertanian. (Prawoto, 2012)

Penelitian lainnya, menggunakan Jenis data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara para ahli. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling yang didasarkan atas pertimbangan keahlian responden. Teknik ini dinamakan Judgmental Sampling (Uma Sekaran dan Roger Bougie, 2010).

Penelitian lainnya, menggunakan Metode analisis data yang meliputi analisis Internal Factor Evaluation (IFE), analisis Exsternal Factor Evaluation (EFE), analisis Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats (SWOT), dan pemilihan strategi dengan menggunakan analisis Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). (David FR, 2012).

Penelitian lainnya, mengintegrasikan pendekatan atau metode kuantitatif dan kualitatif. Kombinasi kedua metode ini diharapkan dapat memperkaya data dan memahami fenomena sosial yang sedang diteliti. Desain penelitian adalah cross sectional. (Ikeu Tanzaha, 2011)

Pada penelitian sebelumnya dilakukan survey awal dan dilanjutkan dengan metode wawancara terbuka untuk mengumpulkan data dalam menjawab masalah penelitian. (Tikkanen, 2018).

Penelitian lainnya menggunakan Pengumpulan data yang dilakukan

dengan metode survey, wawancara, observasi dan dokumentasi obyek-obyek penelitian. (Wuri Marsigit, 2010).

Dalam penelitian lainnya menggunakan metode diskriptif, yaitu penulisan yang memusatkan diri pada pemecahan masalah yang aktual, data yang di kumpulkan di susun, dijelaskan dan dianalisis (Suracmad, 1980). Pemabahasan masalah dengan menggunakan studi pustaka sebagai sumber informasi. (Prabowo, 2010)

Hasil dan Pembahasan

Masalah ketahanan pangan telah muncul sebagai perhatian utama yang diperburuk oleh kerentanan terhadap perubahan iklim dan bencana alam (Shah, Moroca, & Bhat, 2018).

Dalam perspektif sistem ekonomi pangan, ketahanan pangan memiliki tiga pilar utama yaitu subsistem ketersediaan, distribusi dan konsumsi. Pentingnya aksesibilitas rumah tangga terhadap pangan dalam pencapaian ketahanan pangan di Indonesia didasarkan pada pertimbangan berikut :

- (1) Ketahanan dan ketersediaan pangan di tingkat nasional, regional/wilayah merupakan syarat keharusan tetapi itu saja tidak cukup,
- (2) Terjaminnya ketahanan pangan tingkat rumah tangga merupakan syarat kecukupan bagi tercapainya ketahanan pangan lokal, regional, nasional dan global,
- (3). Bukti empiris menunjukkan bahwa di wilayah tahan pangan dan terjamin masih ditemukan proporsi rumah tangga rawan pangan yang cukup tinggi dan
- (4) Kasus rawan pangan dan insiden busung lapar di berbagai daerah pada kondisi ketersediaan pangan nasional (dan wilayah) cukup. Kebijakan untuk meningkatkan aksesibilitas rumah tangga terhadap pangan bertujuan untuk :

- (1) meningkatkan akses rumah tangga terhadap pangan dalam jumlah, kualitas, merata dan terjangkau, dan
- (2) meningkatkan ketahanan pangan rumah tangga melalui keanekaragaman konsumsi pangan yang bergizi dan

berimbang. Implementasi dari ketiga komponen pokok tersebut adalah dengan memanfaatkan sebesar-besarnya potensi sumber daya alam/lokal yang beragam yang dimiliki untuk meningkatkan dan memantapkan ketersediaan bahan pangan sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat; mengembangkan kemitraan dalam pemasaran produksi pangan baik lokal maupun antar daerah sehingga menjamin pemerataan pasokan serta mengupayakan jaminan bagi masyarakat miskin perkotaan dan pedesaan untuk mampu mengakses pangan yang bersifat pokok. (Isyaturiyadhah, 2019)

Konsep ketahanan pangan di Indonesia selalu berkembang dari waktu ke waktu. Pada era orde baru, konsep ketahanan pangan hanya melihat ketahanan pangan dari sisi ketersediaan pangan dalam jumlah yang memadai bagi semua penduduk untuk dapat hidup secara aktif dan sehat.

Dalam hal ini, pemerintah pada masa lalu hanya mendorong ketahanan pangan dari segi kuantitatif (*supply* dan *demand*). Dari pendekatan ini, terdapat tiga indikator yang dapat mempengaruhi kebijakan pangan di Indonesia yaitu : (1) ketahanan pangan secara cepat direfleksikan oleh meningkatnya harga pangan. (2) harga pangan yang terjangkau cukup dapat menjamin akses semua orang untuk memperoleh pangan yang memadai, dan (3) produksi pangan domestik yang cukup (swasembada) merupakan cara yang paling efektif untuk mencapai stabilitas harga pangan dalam negeri dan pada gilirannya mencapai ketahanan pangan. (Rahman dan Ariani, 2002)

Ketahanan pangan seperti itu terbukti sangat rapuh, tidak tahan gejolak (perubahan iklim, dinamika perdagangan internasional) Ketahanan pangan seperti itu terbukti sangat rapuh, tidak tahan gejolak (perubahan iklim, dinamika perdagangan internasional dan naiknya jumlah penduduk) dan tidak berkesinambungan.

Ketahanan pangan adalah masalah multidimensional dan mencakup lintas sektoral, komoditas, daerah atau wilayah serta perkembangan perekonomian baik secara global, nasional maupun wilayah. Ketahanan pangan mempunyai dimensi yang sangat luas mencakup waktu, sasaran dan sosial ekonomi masyarakat, sehingga diperlukan banyak indikator untuk mengukurnya.

Dalam penyusunan strategi kebijakan ketahanan pangan ke depan harus memperhatikan berbagai indikator tersebut. Selain itu juga tetap memperhatikan keterkaitan antarwilayah, antarkomoditas dan antarbidang. Penyusunan strategi ketahanan pangan dilakukan dengan cara sistematis dan terintegrasi, meliputi kebijakan strategis sebagai kerangka ketahanan pangan nasional dan kebijakan implementasi sebagai terjemahan dari kerangka strategis tersebut. Selain itu, perlu adanya hirarki ketahanan pangan tersebut mulai dari tingkat global, nasional, daerah bahkan sampai tingkat rumah tangga. Tingkatan-tingkatan tersebut disusun dengan memperhatikan sinergi antar keterkaitan baik sektoral, komoditas, maupun antardaerah serta jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. (Rachmat Pambudy, 2006) Pendekatan pembangunan ketahanan pangan di masa depan perlu memprioritaskan ketahanan pangan tingkat rumah tangga/individu dengan pola manajemen desentralisasi sebagai konsekuensi dan diterapkannya kebijakan otonomi wilayah. Dalam hal ini peran serta pemerintah daerah dan masyarakat menjadi kunci utama strategi peningkatan dan pemantapan ketahanan pangan rumah tangga dan wilayah. Sementara itu pemerintah (pusat dan daerah) lebih berperan sebagai fasilitator dan menciptakan iklim agar terciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat dan swasta untuk berpartisipasi dalam pembangunan ketahanan pangan di tingkat individu, keluarga, lokal, regional dan nasional.

Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan ketahanan pangan tersebut adalah melalui pemberdayaan kelembagaan lokal seperti lumbung desa dan peningkatan peran masyarakat dalam penyediaan pangan. Hal ini perlu dipertimbangkan sebagai salah satu upaya mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia (Noer; 1995; Sapuan dan A. Soepanto, 1995; dan A. Azis, 1995 dalam Rahman dan Ariani, 2002).

Perencanaan pembangunan desa merupakan bagian integral (kesinambungan) dan holistik dari sistem perencanaan pembangunan Daerah yang mengindikasikan arah kebijakan pemerintah pusat yang perlu dijabarkan lebih rinci dalam arah kebijakan dan program di daerah sekaligus memperkuat kesinambungan dengan kebutuhan pengembangan masyarakat di tingkat lokal/desa. Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan peraturan lainnya yang terkait dengan Peraturan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Pembangunan Desa mensyaratkan adanya sinkronisasi antara Perencanaan Pembangunan Daerah dan Desa. (Mustakim dan Fikriman, 2018), dengan dibangunnya sektor pertanian yang baik maka hal ini juga akan berdampak baik bagi daerah pedesaan karena sektor pertanian merupakan sektor yang sangat berpengaruh bagi daerah pedesaan dalam hal untuk mendapatkan pendapatan riil pedesaan (Fikriman, 2017), pada penelitian (Fikriman. Dkk, 2020) bahwa Tingkat kepuasan masyarakat terhadap dana desa yang digunakan untuk pembangunan pertanian tinggi, hal ini terbukti bahwa dana desa membawa dampak terhadap pembangunan pertanian seperti pembangun jalan usahatani yang memadai maka hal ini sangat besar pengaruhnya bagi masyarakat, akses jalan tersebut mempermudah petani dalam membawa sarana produksi seperti benih,

kandang, pupuk organik, atau sarana pertanian lainnya, serta produksi hasil petani meningkat, petani yang dulunya bercocok tanam secara manual atau tradisional, maka dengan adanya jalan usahatani maka alat atau mesin pertanian pun bisa dibawa untuk meningkatkan produktivitas petani. Lebih lanjut lagi bahwa proses pembangunan secara implisit mensyaratkan adanya transformasi pertanian tradisional menjadi pertanian maju atau modern (Fikriman dan Mawaddah, 2021).

Perubahan dan perkembangan struktural pertanian pada dasarnya berakar pada problema kelembagaan. Konsep dan potensi sistem pertanian tidak dapat melakukan perubahan tanpa diiringi perubahan struktural kelembagaannya. Kesinergisan jejaring disetiap dan antar peraturan, sistem sistem, dan nilai-nilai yang berlaku pada struktur kelembagaan pertanian haruslah terbentuk, sehingga menjadi pendukung kebijakan suatu sektor dan tidak menjadi penghambat perkembangan sektor lainnya. Nilai-nilai dan budaya pertanian maupun masyarakatnya (pelaku usahatani) yang sangat khas, merupakan faktor non teknis sangat menentukan diluar sistem pertanian, termasuk kekayaan kearifan tradisional/local (*indigenous knowledge*) yang selama ini erat dimiliki dan melingkupi para petaninya.

Demikian halnya dengan tercapainya keberhasilan pengembangan agribisnis kedelai, pada dasarnya berkaitan erat dengan peran kelembagaan sebagai pendukungnya. Berbagai pengertian kelembagaan yang berkembang dalam masyarakat untuk: mengatur perilaku para anggota masyarakat yang berlaku disuatu wilayah; dan menggambarkan bentuk susunan (bangunan sosial) dari *social institution*. Kelembagaan merupakan himpunan norma-norma dan tindakan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok kehidupan bersosial masyarakat, dan membentuk piranti sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia ketika bersosialisasi dalam bermasyarakat.

Terdapatnya sanksi terhadap penyimpangan (pelanggaran) sebagai suatu kekuatan (norma) yang digunakan agar para anggota masyarakat mentaatinya. (Elizabeth R, 2007)

Lembaga di perdesaan lahir untuk memenuhi kebutuhan sosial masyarakatnya. Sifatnya tidak linier, namun cenderung merupakan kebutuhan individu anggotanya, berupa: kebutuhan fisik, kebutuhan rasa aman (*safe*), kebutuhan hubungan sosial (*social affiliation*), pengakuan (*esteem*), dan pengembangan pengakuan (*self actualization*). Manfaat utama lembaga adalah mewadahi kebutuhan salah satu sisi kehidupan sosial masyarakat, dan sebagai *social control*, sehingga setiap orang dapat mengatur perilakunya menurut kehendak masyarakat (Elizabeth, 2003). Pemasaran, sebagai salah satu subsistem aktivitas agribisnis, diarahkan pada perbaikan mekanisme penentuan harga yang layak bagi produsen dan pelaku pemasaran. Pemasaran diperlukan untuk mengalirkan produk barang/jasa mulai dari produsen hingga konsumen akhir (Kohl dan Uhl, 1990; Dahl, 1997; dalam Elizabeth, 2007b).

Dengan demikian diperlukan kerjasama yang *solid* antar perantara (lembaga atau pelaku pemasaran) dan konsumen, yang akan menghasilkan keuntungan (margin) pemasaran (Elizabeth, 2003). Dari konsep tersebut, tercermin aktivitas pendistribusian hasil yang mempermudah dan memperlancar penyampaian barang/jasa dimana penggunaannya meliputi jenis, jumlah, harga, tempat, dan waktu dibutuhkan (Tjiptono, 1998; dalam Elizabeth, 2007b). Pemberdayaan dan pengembangan kelembagaan di perdesaan, meliputi: 1) polapengembangan pertanian berdasarkan luas dan intensitas lahan, perluasan kesempatan kerja dan berusaha yang dapat memperluas penghasilan; 2) perbaikan dan penyempurnaan keterbatasan pelayanan sosial (pendidikan, gizi dan kesehatan, dan sebagainya); 3) program memperkuat prasarana kelembagaan dan

ketrampilan mengelola kebutuhan perdesaan. Untuk keberhasilannya diperlukan kerjasama antara: administrasi lokal, pemerintah lokal, kelembagaan/organisasi yang beranggotakan masyarakat lokal, kerjasama usaha, pelayanan dan bisnis swasta (tiga pilar kelembagaan) yang dapat diintegrasikan ke dalam pasar baik lokal, regional dan global (Uphoff, 1992).

Dengan melakukan upaya pengembangan, pemberdayaan, dan penguatan kelembagaan petani (seperti: kelompok tani, lembaga tenaga kerja, kelembagaan penyedia input, kelembagaan output, kelembagaan penyuluh, dan kelembagaan permodalan) diharapkan dapat melindungi *bargaining position* petani. Tindakan perlindungan sebagai keberpihakan pada petani tersebut, baik sebagai produsen maupun penikmat hasil jerih payah usahatani mereka terutama diwujudkan melalui tingkat harga output yang layak dan menguntungkan petani. Hal tersebut sangat diperlukan dan diharapkan petani kedelai demi kesinambungan dan keberlanjutan usahatani mereka. Dengan demikian, penguatan dan pemberdayaan kelembagaan tersebut juga untuk menghasilkan pencapaian kesinambungan dan keberlanjutan daya dukung SDA (*marginal sustainability yield*) dan berbagai usaha untuk menopang dan menunjang aktivitas kehidupan, merupakan bagian penting pembangunan pertanian dan perdesaan. (Elizabeth R, 2007)

Demikian halnya dengan tercapainya keberhasilan pengembangan agribisnis kede lai, pada dasarnya berkaitan erat dengan peran kelembagaan sebagai pendukungnya. Berbagai pengertian kelembagaan yang berkembang dalam masyarakat untuk: mengatur perilaku para anggota masyarakat yang berlaku disuatu wilayah; dan menggambarkan bentuk susunan (bangunan sosial) dari *social institution*. Kelembagaan merupakan himpunan norma-norma dan tindakan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok

kehidupan bersosial masyarakat, dan membentuk piranti sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia ketika bersosialisasi dalam bermasyarakat. Terdapatnya sanksi terhadap penyimpangan (pelanggaran) sebagai suatu kekuatan (norma) yang digunakan agar para anggota masyarakat mentaatinya. (Elizabeth R, 2007)

Indonesia mempunyai keunggulan komparatif (*comparative advantage*) sebagai negara agraris dan maritim. Keunggulan komparatif tersebut merupakan sumberdaya pembangunan yang perlu didayagunakan melalui pembangunan ekonomi sehingga menjadi keunggulan bersaing (*competitive advantage*). Dengan begitu perekonomian yang dikembangkan di Indonesia memiliki landasan yang kokoh pada sumberdaya domestik, memiliki kemampuan bersaing dan berdayaguna bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selama ini, kegiatan ekonomi yang memanfaatkan keunggulan komparatif tersebut telah berkembang dalam bentuk usaha budidaya pertanian. Pendekatan pembangunan seperti ini, yang tidak disertai dengan pengembangan industri hulu pertanian, industri hilir pertanian, serta jasa-jasa pendukung secara harmonis dan simultan, tidak mampu mendayagunakan keunggulan komparatif menjadi keunggulan bersaing. Meskipun Indonesia berhasil menjadi salah satu produsen terbesar pada beberapa komoditas pertanian primer di dunia, tetapi Indonesia belum memiliki kemampuan bersaing di pasar internasional. Selain itu, nilai tambah yang diraih dari pemanfaatan keunggulan komparatif tersebut masih relatif kecil, sehingga tingkat pendapatan masyarakat tetap rendah.

Belajar dari pengalaman masa lalu tersebut, pendekatan pembangunan ekonomi dalam rangka mendayagunakan keunggulan komparatif menjadi keunggulan bersaing perlu dirubah dari pembangunan pertanian (budidaya)

kepada pembangunan sistem agribisnis di mana kegiatan budidaya pertanian, industri hulu pertanian, industri hilir pertanian, serta sektor yang menyediakan jasa yang diperlukan, dikembangkan secara simultan dan harmonis.

Pembangunan sistem dan usaha agribisnis tersebut perlu ditempatkan bukan hanya sebagai pendekatan baru pembangunan pertanian, tetapi lebih dari itu perlu dijadikan sebagai penggerak utama pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. (Suryana, 2002)

Pembangunan agribisnis tanpa memperbandingkan dengan dua lajur lainnya. Secara umum, syarat keharusan agar suatu sektor layak dijadikan sebagai andalan perekonomian nasional ialah memiliki kontribusi yang dominan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, dalam pencapaian tujuan pembangunan perekonomian nasional. Sektor agribisnis jelas memiliki peranan yang sangat dominan, khususnya dalam hal pemantapan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pendapatan. Kesemuanya ini merupakan tujuan pembangunan ekonomi yang sangat penting, dan bahkan lebih penting daripada peranan dalam kontribusi dan pertumbuhan PDB, dimana saat ini kontribusi sektor agribisnis dalam PDB tidak lagi dominan dan cenderung mengalami penurunan. Secara

Secara rinci ada lima syarat suatu sektor dapat dikatakan sebagai sektor andalan perekonomian nasional, yaitu tangguh, progresif, ukurannya cukup besar, artikulatif dan responsif. Kelima syarat khusus tersebut harus dipenuhi agar suatu sektor dapat menjadi sektor andalan perekonomian nasional. Pembangunan agribisnis diyakini dapat memenuhi persyaratan tersebut secara simultan, sehingga diharapkan mampu menjamin keberlanjutan pembangunan ekonomi

nasional. Pembangunan agribisnis sebagai sektor andalan diharapkan mampu mencapai pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan penanganan lingkungan secara inklusif dan integratif. Sudah saatnya pembangunan ekonomi daerah yang menyangkut sebagian besar kepentingan ekonomi rakyat banyak tidak berhenti pada retorika saja, melainkan harus sesegera mungkin diwujudkan dalam aksi nyata dan dukungan Kebijakan makro ekonomi. Hal ini antara lain diwujudkan melalui penerapan konsep pengembangan agribisnis dalam pembangunan ekonomi daerah atau pengembangan ekonomi lokal.

Meskipun sudah banyak yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya mengembangkan agribisnis, tetapi masih terdapat berbagai kendala, terutama dalam menjaga kualitas produk yang memenuhi standar pasar internasional serta kontinuitas produksi sesuai dengan permintaan pasar maupun untuk mampu mendukung suatu industri hilir dari produksi pertanian. Salah satu alternatif untuk menjaga kontinuitas dari kualitas produk adalah dengan mengembangkan kegiatan agribisnis disesuaikan dengan potensi sumber daya alam. Potensi sumber daya alam tersebut tersebar tidak merata untuk setiap pulau/wilayah/daerah. Oleh sebab itu pengembangannya perlu dikaitkan dengan pengembangan wilayah nasional dan lokal, yang berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) yang telah mengidentifikasi kawasan andalan dan kawasan prioritas pengembangan serta jenis pengembangannya. (Nurif, 2010)

Permasalahan utama yang dihadapi dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia saat ini adalah pertumbuhan permintaan pangan yang lebih cepat dari pertumbuhan penyediaan. Permintaan yang meningkat merupakan resultante dari pening-

jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat, dan perubahan selera. Sementara itu, pertumbuhan kapasitas produksi pangan nasional cukup lambat dan stagnan, karena: (a) adanya kompetisi dalam pemanfaatan sumberdaya lahan dan air, serta (b) stagnansi pertumbuhan produktivitas lahan dan tenaga kerja pertanian. Tantangan ini juga terus berkembang secara dinamis seiring dengan perkembangan sosial, budaya, ekonomi dan politik. Perkembangan sektor pertanian juga tidak terisolasi dari isu globalisasi dan suasana reformasi dan segala dinamika aspirasi masyarakatnya dan perubahan tatanan pemerintahan ke arah desentralisasi (otonomi).

Dalam sektor ini terkait masalah sumber daya lahan (dan perairan) sebagai basis kegiatan sektor pertanian semakin terdesak oleh kegiatan perekonomian lainnya termasuk prasarana pemukiman dan transportasi, teknologi, SDM, kegiatan hulu dan hilir,

Kesejahteraan masyarakat produsen maupun konsumen, sistem pasar domestik hingga global, dan penyelenggaraan pelayanan publik, yang masing-masing dapat saling mempengaruhi. Mengingat demikian besarnya peranan dan demikian kompleksnya aspek yang terkait dalam upaya mewujudkan stabilitas penyediaan pangan nasional dari waktu ke waktu, pembangunan sektor pertanian memerlukan perhatian dan pemikiran yang dalam serta upaya yang bersifat menyeluruh. (Mayrowani, 2011)

Pembangunan pertanian mempunyai tujuan umum yaitu memajukan agribisnis, yaitu dengan membangun secara sinergis dan harmonis aspek aspek: (1) industri hulu pertanian yang meliputi perbenihan, input produksi lainnya dan alat mesin pertanian; (2) pertanian primer (on-farm); (3) industri hilir pertanian (pengolahan hasil); dan (4) jasa-jasa penunjang yang terkait Rossi Prabowo Kebijakan Pemerintah

Dalam «. Jurnal Ilmu ± ilmu Pertanian 68 dalam memajukan agribisnis. Setiap pelaku agribisnis mengharapkan adanya insentif bagi pendapatan dalam menjalankan perannya dalam perkembangan agribisnis, tanpa adanya insentif tambahan maka mereka akan enggan menekuni agribisnis, maka kunci dalam meningkatkan kinerja di sektor ini adalah menciptakan insentif ekonomi yang menunjang daya tarik agribisnis. Selain hal tersebut di atas, membatasi produk impor juga menjadi salah satu hal yang wajib dipertimbangkan oleh pemerintah. Di samping itu juga dengan peningkatan biaya masuk barang produk pertanian dari luar. Dengan pembatasan tersebut diharapkan akan lebih memberikan kesempatan produk lokal mempunyai pasar di Negara sendiri. Yang tentunya di ikuti dengan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produk. Diversifikasi lahan pertanian menjadi lahan pemukiman dan industri juga menjadi kendala yang sangat berarti bagi pencapaian ketahanan pangan lokal maupun nasional, dengan mengacu pada hal tersebut, pemerintah diharapkan mampu membuat blue print peta lokasi pengembangan sektor pertanian berdasarkan pada tingkat produktifitas daerah penghasil produk pertanian. Sehingga dengan adanya peta lokasi tersebut, pemerintah mempunyai pembatasan terhadap adanya diversifikasi lahan pertanian untuk pemukiman dan industri dan lebih mengoptimalkan peningkatan hasil pertanian pada lokasi tersebut salah satunya dengan memperluas lahan pertanian. (Prabowo, 2010)

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil studi dari penelitian-penelitian sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa untuk menjamin keberlanjutan ketahanan pangan melalui peningkatan ketersediaan pangan nasional, terutama beras sekaligus peningkatan kesejahteraan petani diperlukan

kebijakan jangka panjang dan jangka pendek. Untuk jangka pendek masih diperlukan kebijakan perlindungan petani dengan pembatasan impor produk pertanian namun hendaknya didukung pula dengan kebijakan yang mendorong peningkatan produksi domestik melalui upaya peningkatan produktivitas produk pertanian nasional. Selain itu pula untuk daerah penghasil pertanian lainnya perlu dilakukan peningkatan produktivitas dan luas panen, baik dengan perluasan lahan maupun peningkatan intensitas tanam per tahun dengan jaminan ketersediaan irigasi dan input pertanian.

Dari berbagai hal yang telah dibahas pada hal-hal sebelumnya ternyata tidak dapat dipungkiri bahwa sektor pertanian dan pedesaan juga dapat membantu meningkatkan perekonomian nasional.

Peningkatan ketahanan pangan merupakan prioritas utama dalam pembangunan karena pangan merupakan kebutuhan yang paling dasar bagi manusia sehingga pangan sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi nasional.

Mengingat pelayanan dan fasilitasi pemerintah untuk pengembangan sistem dan usaha agribisnis dan pemantapan ketahanan pangan tidak hanya menjadi kewenangan Departemen Pertanian; maka dukungan dan kerja sama sinergis lintas sektor dan lintas wilayah mutlak diperlukan. Selain itu, sejak reformasi digulirkan, telah disepakati untuk menghargai partisipasi masyarakat dan otonomi daerah yang sedang dalam proses demokratisasi yang lebih bermakna. Oleh karena itu, proses perencanaan dan implementasi membangun ketahanan pangan mulai pengembangan agribisnis tidak dapat keluar dari koridor kesepakatan tersebut. Pemantapan ketahanan pangan harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan (stake holder) dengan melihat manfaat dan konsekuensinya secara menyeluruh dan obyektif, baik untuk generasi sekarang dan tidak

menimbulkan beban kepada generasi berikutnya.

Dengan dibangunnya sektor pertanian yang baik maka hal ini juga akan berdampak baik bagi daerah pedesaan karena sektor pertanian merupakan sektor yang sangat berpengaruh bagi daerah pedesaan dalam hal untuk mendapatkan pendapatan riil pedesaan. Jika sektor pertanian yang ada di desa dapat terus maju dan berkembang maka pendapatan riil pedesaan juga pasti akan naik. Jika pendapatan riil semakin meningkat maka desa itu bisa melakukan pembangunan desa yang bersangkutan seperti pembangunan jalan dan infrastruktur lainnya yang bisa memajukan desa tersebut. Dengan demikian jika transformasi pertanian dan lingkungan pedesaan dapat terlaksana dengan baik, maka perekonomian nasional negara yang bersangkutan pasti akan berjalan ke arah yang lebih baik dimana distribusi pendapatan di negara yang bersangkutan itu dapat terlaksana.

Dengan pengembangan agribisnis seperti ini, dalam pertumbuhannya diharapkan akan mampu menghela aktivitas dinamika perekonomian yang berbasis pertanian di daerah perifer dan penyangga, yang kemudian pada gilirannya akan mengeliminasi perkembangan arus urbanisasi dari daerah-daerah tersebut dan yang paling penting adalah terciptanya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bustanul, A. (2004). Analisis ekonomi pertanian Indonesia. *Penerbit Buku Kompas, Jakarta*.
- Elizabeth, R. (2007). Penguatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Petani Mendukung Pengembangan Agribisnis Kedelai. *Sumber, 3*, 3-352.
- Elizabeth, R. (2007). Penguatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Petani Mendukung Pengembangan Agribisnis Kedelai. *Sumber, 3*, 3-352.
- Elizabeth, R. 2007b. Restruturisasi Pemberdayaan Kelembagaan Pangan mendukung Perekonomian Rakyat di Perdesaan dan Ketahanan Pangan Berkelanjutan. Makalah Simposium Tanaman Pangan V. 29-29 Agustus 2007. Puslit- bangtan Pertanian. Bogor.
- Elizabeth, R. dan V. Darwis. 2003. Karakteristik tani Miskin dan Persepsinya terhadap Program JPS di Provinsi Jawa Timur. SOCA. Bali.
- Fikriman, F. (2017). Tranformasi Pertanian dan Pembangunan Pedesaan. *JAS (Jurnal Agri Sains), 1*(2).
- Fikriman, F., & Mawaddah, N. (2021). Regional Autonomy and Agricultural Development: Regional Autonomy Policy and Agricultural Development Strategy (Articel Review). *Baselang, 1*(1), 6-14.
- Fikriman, F., Amri, S., & Susilawati, W. (2020). Peran Dana Desa dalam Pembangunan Pertanian di Desa Kapuk Kecamatan Tabir Ulu Kabupaten Merangin. *JAS (Jurnal Agri Sains), 4*(1), 20-30.
- Hermawan, R., & SP, M. (2008). Membangun Sistem Agribisnis. *Agroinfo. Yogyakarta*.
- Isyaturriyadhah, I. (2019). Ketahanan Pangan Suku Anak dalam (Sad) di Propinsi Jambi Artikel Review. *JAS (Jurnal Agri Sains), 3*(2).
- Marsigit, W. (2010). Pengembangan diversifikasi produk pangan olahan lokal bengkulu untuk menunjang ketahanan pangan berkelanjutan. *Agritech, 30*(4).

- Mayrowani, H. (2011). Pengembangan agroforestry untuk mendukung ketahanan pangan dan pemberdayaan petani sekitar hutan.
- Mustakim, M., & Fikrman, F. (2018). Implementasi Pembangunan Pertanian Di Era Otonomi Desa (Studi Kasus Dusun Karya Harapan Mukti Kecamatan Pelepat Iir Kabupaten Bungo). *JURNAL GALUNG TROPIKA*, 7(3), 236-245.
- Nurif, M. (2010). Pembangunan Ekonomi Berbasis Agribisnis sebagai Wujud dari Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan. *JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH)*, 3(2), 124-138.
- Pambudy, R. (2006, September). Ketahanan pangan dalam sistem dan usaha agribisnis: pemberdayaan petani dan organisasi petani. In *Prosiding Seminar Hasil Pangan Sedunia XXVI*.
- Prabowo, R. (2010). Kebijakan pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia. *Mediagro*, 6(2).
- Prawoto, N. (2012). Model pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berbasis kemandirian untuk mewujudkan ketahanan ekonomi dan ketahanan pangan (Strategi pemberdayaan ekonomi pada masyarakat Dieng di Propinsi Jawa Tengah). *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 8(2), 121-134.
- Purwaningsih, Y. (2008). Ketahanan pangan: situasi, permasalahan, kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 9(1), 1-27.
- Rahman, H.P.S. dan Ariani, M. 2002. Ketahanan Pangan: Konsep, Pengukuran dan Strategi. FAE. Vol. 20 No. 1.
- Sekaran U, Roger B. 2010. Research Methods for Business: A Skill Building Approach. New Jersey: John Wiley&Sons. David FR. 2012. Manajemen Strategis. edisi ke-12. Jakarta: Salemba Empat.
- Shah, S., Moroca, A., & Bhat, J. A. (2018). Neo-traditional approaches for ensuring food security in Fiji Islands. *Environmental Development*, 28 (November), 83–100. <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2018.11.001>
- Stiglitz, J.E. 2006. Making Globalization Work. W.W. Norton & Co. New York & London
- Suryana, A. (2002). Membangun Ketahanan Pangan Regional Melalui Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis. *Prosiding Lokakarya "Pengembangan Usahatani Terpadu Berwawasan Agribisnis Menunjang Pemanfaatan Sumberdaya Pertanian Jawa Barat. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jawa Barat, Lembang*.
- Suryana, Achmad. (2005). Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional. Makalah IPB, bogor.
- Tanziha, I. (2011). Model Pemberdayaan Petani Menuju Ketahanan Pangan Keluarga. *Jurnal Gizi dan Pangan*, 6(1), 90-99.
- Tikkanen, J. (2018). Participatory turn-and down-turn-in Finland's regional forest programme process. *Forest Policy and Economics*, 89(March 2016), 87–97. <https://doi.org/10.1016/j.forpol.2017.04.009>
- Uphoff, N. 1992. Local Institution & Participation for Sustainable Development. IIED. London.